

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan untuk mengukur kuisisioner dengan menghitung setiap soal yang ada pada kuisisioner, kemudian skor-skor yang diperoleh dari kuisisioner dihitung dengan menggunakan rumus koefisien korelasi person dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil uji validitas sebagai berikut :

##### a. Pemahaman Iklim Usaha

Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang iklim usaha terdapat empat pertanyaan mengenai iklim usaha yang meliputi pengertian, manfaat, peluang dan keuntungan. Hasil dari uji validitas sebagai berikut :

**TABEL 5.1.**

Uji Validitas pada Pemahaman Iklim Usaha

Item	Korelasi Anti-Image	Keterangan
Pengertian iklim usaha	0,896	Valid
Manfaat iklim usaha	0,764	Valid
Peluang iklim usaha	0,875	Valid
Keuntungan iklim usaha	0,779	Valid

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Dari hasil tabel 5.1 diatas diperoleh hasil korelasi anti-image atau nilai korelasi setiap item pada pertanyaan tentang

pengertian iklim usaha sebesar ( $0,896 > 0,50$ ), manfaat iklim usaha ( $0,764 > 0,50$ ), peluang iklim usaha ( $0,875 > 0,50$ ) dan keuntungan iklim usaha ( $0,779$ ). Dari hasil tersebut berarti dari keempat item sudah mendapatkan hasil  $> 0,50$  dapat dinyatakan bahwa item yang digunakan untuk mengukur konstruk kepuasan instrinisk memenuhi kriteria sebagai pembentuk konstruk dengan demikian dapat dibuktikan bahwa item valid.

b. Persepsi pelaku usaha

Untuk mengetahui persepsi pelaku usaha pada sentra industri kecil di Kabupaten Sleman atas variabel kebijakan pemerintah, kestabilan sosial & politik, infrastruktur, sistem keuangan dan birokrasi didapat 11 item pertanyaan yang menghasilkan uji sebagai berikut :

**TABEL 5.2.**  
Uji Validitas pada Persepsi Pelaku Usaha

<b>Item</b>	<b>Korelasi anti image</b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0,609	Valid
Pertanyaan 2	0,840	Valid
Pertanyaan 3	0,609	Valid
Pertanyaan 4	0,837	Valid
Pertanyaan 5	0,616	Valid
Pertanyaan 6	0,811	Valid
Pertanyaan 7	0,841	Valid
Pertanyaan 8	0,899	Valid
Pertanyaan 9	0,599	Valid
Pertanyaan 10	0,880	Valid
Pertanyaan 11	0,893	Valid

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Dari hasil uji korelasi anti image pada item persepsi pelaku usaha menghasilkan korelasi yang cukup tinggi pada setiap skor masing-masing item sudah memenuhi batas  $> 0,50$  bahwa dari hasil diatas tentang persepsi pelaku usaha dapat dikatakan valid dan layak untuk dianalisis.

**TABEL 5.3.**  
Uji Korelasi

<b>Item</b>	<b>KMO</b>	<b>Sig</b>
Pemahaman iklim usaha	0,821	0,000
Persepsi pelaku usaha	0,788	0,000

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat dilihat hasil uji validitas menggunakan uji KMO pada item pertanyaan pemahaman iklim usaha dan persepsi pelaku usaha bahwa di dapat nilai korelasi secara umum dengan melihat pada tabel KMO sebesar 0,821 dan nilai signifikan 0,000 pada item pemahaman iklim usaha itu berarti instrument sudah memenuhi batas  $> 0,50$  ( $0,821 > 0,50$ ) bisa dikatakan valid. Pada item persepsi pelaku usaha didapat nilai korelasi secara umum sebesar 0,788 dan nilai signifikan 0,000 itu berarti instrumen valid ( $0,788 > 0,50$ ) dan kedua item layak untuk kepentingan analisis faktor.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui ketepatan dari alat ukur yang digunakan dalam penilitan. Perhitungan reliabilitas harus dilakukan pada item-item yang sudah memiliki validitas. Nilai koefisien

reliabilitas yang baik adalah  $> 0,7$  (cukup baik) diatas  $0,8$  (baik) pada nilai *Cronbach's Alpha*. Hasil uji reliabilitas dari penelitian ini sebagai berikut :

**TABEL 5.4.**  
Uji Reliabilitas

Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman iklim usaha	0,940	Reliabel
Persepsi pelaku usaha	0,906	Reliabel

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 5.4 diatas hasil uji reliabilitas pada tabel dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing item lebih besar dari  $0,7$  maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrument yang digunakan dalam variabel ini adalah reliabel.

**TABEL 5.5.**  
Uji Reliabilitas Pemahaman Pelaku Usaha

Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengertian iklim usaha	0,939	Reliabel
Manfaat iklim usaha	0,910	Reliabel
Peluang iklim usaha	0,924	Reliabel
Keuntungan iklim usaha	0,912	Reliabel

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 5.5 diatas diperoleh hasil *Cronbach Alpha* pada setiap item pada dasarnya dapat dikatakan Reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,7$ . Pada item diatas tentang pengertian iklim usaha nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,939$ . Diikuti item manfaat iklim usaha  $0,910$  dan  $0,924$  untuk item peluang iklim usaha serta  $0,912$  pada item keuntungan iklim usaha.

Setiap item memiliki nilai  $> 0,90$  itu berarti setiap item memiliki tingkat reliabiliti yang sangat handal.

**TABEL 5.6.**  
Uji Reliabilitas Persepsi Pelaku Usaha

<b>Item</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0,911	Reliabel
Pertanyaan 2	0,893	Reliabel
Pertanyaan 3	0,906	Reliabel
Pertanyaan 4	0,886	Reliabel
Pertanyaan 5	0,911	Reliabel
Pertanyaan 6	0,889	Reliabel
Pertanyaan 7	0,887	Reliabel
Pertanyaan 8	0,887	Reliabel
Pertanyaan 9	0,908	Reliabel
Pertanyaan 10	0,891	Reliabel
Pertanyaan 11	0,892	Reliabel

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 5.6 diatas menunjukkan hasil uji koefisien *Cronbach's Alpha* pada setiap item dengan nilai antara  $0,80 < 0,90$  bisa diartikan setiap item dengan tingkat reliabiliti tersebut handal bahkan ada item diatas yang memiliki nilai  $0,90 >$  itu berarti tingkat reliabiliti pada item tersebut sangat handal dan item-item diatas reliabel.

### 3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yakni data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sebuah data yang telah dikumpulkan, sebagaimana yang sudah di dapat tanpa ada tujuan untuk membuat kesimpulan untuk generalisasi. Statistik dreskriptif juga merupakan prosen modifikasi dari sebuah data

penelitian menjadi bentuk tabulasi data responden yang di dapat melalui pengisian kuesioner dan penjelasannya sehingga dapat diinterpretasikan.

**TABEL 5.7.**  
Uji Statistik Deskriptif

No	Item	N	Max	Min	Mean	Std.Deviation
1	P1	94	5	3	4,56	,540
2	P2	94	5	1	3,98	,688
3	P3	94	5	2	4,48	,582
4	P4	94	5	1	3,86	,770
5	P5	94	5	3	4,55	,541
6	P6	94	5	1	3,96	,789
7	P7	94	5	1	3,98	,816
8	P8	94	5	1	3,97	,873
9	P9	94	5	2	4,45	,580
10	P10	94	5	1	3,93	,845
11	P11	94	5	1	4,04	,540
Valid (N)		94				

Sumber : SPSS, Diolah (2018)

Dari hasil uji deskriptif statisti persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha memperoleh hasil seperti tabel diatas. Bahwa banyaknya data yang diolah ada 94, maksimal jawaban responden adalah 5 dan minimal 1. Untuk besarnya mean dan standar deviasi setiap pertanyaan terlihat pada tabel diatas.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemahaman pelaku usaha tentang Iklim Usaha**

Dari pertanyaan peneliti untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha tentang iklim usaha supaya penelitian dapat dilanjutkan dan dianalisis sehingga peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemahaman para pelaku usaha sentra industri kecil

di Kabupaten Sleman tentang iklim usaha diperoleh hasil sebagai berikut :

**TABEL 5.8.**  
Pemahaman Pelaku Usaha tentang Pengertian Iklim Usaha

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak tahu	5	5%
2	Tidak tahu	5	5%
3	Kurang tahu	22	23%
4	Tahu	46	49%
5	Sangat tahu	16	17%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.8 diatas menunjukkan pemahaman pelaku usaha atas pengertian iklim usaha sudah cukup baik karena setengah dari total responden keseluruhan menjawab tahu 46 responden (49%), sangat tahu 16 responden (17%) tetapi masih ada beberapa pelaku usaha yang kurang tahu sebesar 22 responden (23%), tidak tahu 5 responden (5%) bahkan sangat tidak tahu 5 responden (5%).

Pada responden pelaku usaha mayoritas menganggap iklim usaha sebuah daya saing pada industri-industri agar usahanya dapat berkembang dan maju. Tentu saja dalam sebuah perkembangan industri mengalami pasang surut pada usaha yang dijalani mereka serta segala prosedur-prosedur yang mengatur tentang kemudahan berusaha agar terciptanya iklim usaha yang kondusif di wilayahnya. Bagi responden yang kurang mengetahui atau tidak tahu tentang iklim usaha tersebut mereka menganggap iklim usaha

sebuah cuaca bagi dunia usaha atau tingkat daya beli oleh konsumen.

**TABEL 5.9.**

Pemahaman Pelaku Usaha tentang Manfaat dari Iklim Usaha

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak tahu	2	2%
2	Tidak tahu	17	18%
3	Kurang tahu	31	33%
4	Tahu	34	36%
5	Sangat tahu	10	11%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.9 menunjukkan seberapa besar para pelaku usaha tersebut mengetahui tentang manfaat pada iklim usaha. Dari hasil survey menunjukkan belum ada setengah pelaku usaha dari total keseluruhan responden yang mengetahui manfaat dari iklim usaha tersebut. Berdasarkan tabel pelaku usaha yang tahu dan sangat tahu hanya 34 responden (36%) dan 10 responden (11%). Pelaku usaha yang kurang mengetahui manfaat iklim usaha ada 31 responden (33%), tidak tahu 17 responden (18%) dan sangat tidak tahu 2 responden (2%).

Pelaku usaha menganggap sebuah manfaat dari iklim usaha adalah untuk mengetahui situasi atau kondisi lapangan usaha disuatu wilayah. Untuk pelaku usaha yang menjawab kurang mengetahui bahkan tidak tahu manfaat dari iklim usaha tersebut disebabkan oleh faktor pengetahuan responden yang kurang atas teori iklim usaha, mereka hanya menjalankan praktik usaha saja

jadi tidak mengetahui secara luas dunia usaha sekarang ini bisa disebabkan karena faktor pendidikan serta lingkungan usaha. Tapi mereka menganggap sebuah manfaat iklim usaha seperti banyaknya konsumen yang membeli produk-produk mereka.

**TABEL 5.10.**  
Pemahaman Pelaku Usaha Tentang Iklim Usaha untuk  
Membaca Peluang Pasar

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak tahu	4	4%
2	Tidak tahu	13	14%
3	Kurang tahu	35	37%
4	Tahu	27	29%
5	Sangat tahu	15	16%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.10 menunjukkan pemahaman pelaku usaha tentang iklim usaha untuk membaca peluang pasar. Hasil survei menunjukkan tingkat responden yang tahu tentang peluang iklim usaha hanya 27 responden (29%), sangat tahu 15 responden (16%). Untuk pelaku usaha yang menjawab kurang tahu ada 35 responden (37%), tidak tahu ada 13 responden (14%) dan sangat tidak tahu ada 4 responden (4%).

Pengetahuan responden pada umumnya tentang membaca peluang pasar atas iklim usaha di wilayahnya hanya sekedar melihat situasi atau kondisi dimana para pelaku usaha dapat memasarkan hasil usahanya dan menguntungkan bagi pelaku usaha tersebut sehingga mereka kurang mengetahui strategi yang dapat

dikembangkan untuk membaca peluang pasar pada iklim usaha tersebut.

**TABEL 5.11.**  
Pemahaman Pelaku Usaha Tentang Iklim Usaha Yang Kondusif Memberikan Keuntungan Bagi Pengusaha

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak tahu	2	2%
2	Tidak tahu	19	20%
3	Kurang tahu	28	30%
4	Tahu	34	36%
5	Sangat tahu	11	12%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.11 menunjukkan pemahaman pelaku usaha tentang iklim usaha yang kondusif memberikan keuntungan bagi pengusaha didapatkan hasil survei seperti yang ada diatas responden yang mengetahui maksud pertanyaan tersebut menjawab tahu ada 34 responden (36%), sangat tahu ada 11 responden (12%). Untuk pelaku usaha yang menjawab kurang tahu ada 28 responden (30%), tidak tahu ada 19 responden (20%) dan sangat tidak tahu ada 2 responden (2%).

Banyak pelaku usaha yang menganggap iklim usaha yang kondusif apabila dalam menjalankan usaha mereka tidak terdapat gangguan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah agar usahanya dapat berkembang dan maju. Iklim usaha yang kondusif menurut mereka dimana mereka mengembangkan usahanya tanpa gangguan dari siapapun dan tidak terjadi kerususan dalam industri usaha sehingga dapat dikatakan iklim usaha yang kondusif

memberikan keuntungan bagi para pengusaha yang mengembangkan usahanya agar dapat berkembang dan maju dalam dunia usaha.

## 2. Persepsi Pelaku Usaha Tentang Iklim Usaha Di Kabupaten Sleman

Dari 94 orang responden, hasil kuisisioner yang telah dibagikan melalui proses analisis dengan alat bantu statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut.

**TABEL 5.12.**  
Persepsi Pelaku Usaha tentang Kondisi Iklim Usaha yang Kondusif

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak setuju	0	0 %
2	Tidak setuju	0	0 %
3	Kurang setuju	2	2 %
4	Setuju	37	39 %
5	Sangat setuju	55	59 %

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat persepsi para pelaku usaha tentang iklim usaha di kabupaten sleman bahwa terlihat 55 responden (55%) menjawab sangat setuju. Sedangkan 37 responden (37%) menjawab setuju dan hanya 2 responden (2%) yang menjawab kurang setuju. Maka dari itu iklim usaha di kabupaten sleman kondusif untuk para pelaku usaha menanamkan modalnya di kabupaten sleman karena para responden beranggapan bahwa di kabupaten sleman sebagai kota metropolitan untuk para pelaku

usaha untuk mengembangkan usahanya di kabupaten sleman dianggap kondusif.

Sesuai dengan hasil tersebut responden sangat setuju bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mempunyai iklim usaha yang kondusif. Menurut Lestari (2014), Iklim usaha yang kondusif akan memperkuat pertumbuhan ekonomi atau menguntungkan dalam sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu mekanisme yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Peningkatan iklim usaha merupakan daya penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Sleman dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,25 persen dari 5,18 persen. Maka dari itu iklim usaha yang kondusif mampu meningkatkan aspek perekonomian kabupaten sleman.

**TABEL 5.13.**  
Persepsi Pelaku Usaha tentang Kebijakan Pemerintah dalam Dunia Usaha Dinilai Baik

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	1	1 %
3	Kurang setuju	1	1 %
4	Setuju	44	47 %
5	Sangat setuju	48	51 %

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari tabel 5.13 diatas para pelaku usaha sentra industri kecil mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten sleman

dalam dunia usaha dinilai baik. Dari hasil survei diatas terdapat 48 responden (51%) yang menyatakan sangat setuju dan 44 responden (47 %) yang menjawab setuju. Namun masih ada 1 responden (1%) yang menjawab kurang setuju dan ada pelaku usaha yang menjawab tidak setuju 1 responden (1%), kebijakan pemerintah kabupaten sleman.

Para pelaku usaha sentra industri kecil menilai kebijakan peemerintah dalam dunia usaha dinilai baik. Kebijakan pemerintah dianggap pro terhadap pengusaha karena kebijakan pemerintah mempermudah para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

**TABEL 5.14.**  
Persepsi Pelaku Usaha Tentang Kabupaten Sleman  
Dinilai Aman Untuk Membuka Usaha

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak setuju	0	0%
2	Tidak setuju	0	0%
3	Kurang setuju	2	2%
4	Setuju	38	40%
5	Sangat setuju	54	57%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat bahwa kabupaten sleman dinilai aman dalam membuka usaha karena banyak responden yang menjawab setuju sebesar 38 responden (40%) dan 54 responden menjawab sangat setuju (57%) tetapi masih ada responden yang menjawab kurang setuju 2 responden (2%) untuk jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Maka dari itu

hampir semua pelaku usaha menilai kabupaten sleman sangat kondusif dan aman untuk dunia usaha. Tidak ada aksi premanisme dan aksi demonstrasi yang mengganggu dunia usaha.

**TABEL 5.15.**  
Persepsi Pelaku Usaha Tentang Sistem Birokrasi  
Di Kabupaten Sleman Kurang Menguntungkan Dunia Usaha

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak setuju	2	2%
2	Tidak setuju	2	2%
3	Kurang setuju	14	15%
4	Setuju	54	57%
5	Sangat Setuju	22	23%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.15 diatas persepsi para pelaku usaha tentang sistem birokrasi yang kurang menguntungkan dunia usaha. Ada 54 responden (57%) yang menjawab setuju dan 22 responden (23%) menjawab sangat setuju. Namun ada responden yang menjawab kurang setuju bahwa sistem birokrasi di kabupaten sleman kurang menguntungkan dunia usaha ada 14 responden (15%), tidak setuju 2 responden (2%) dan pelaku usaha menjawab sangat tidak setuju ada 2 responden (2%) .

**TABEL 5.16.**  
Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Kondisi Infrastruktur  
Di Kabupaten Sleman Di Nilai Memadai

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak setuju	0	0%
2	Tidak setuju	1	1%
3	Kurang setuju	1	1%
4	Setuju	47	50%
5	Sangat setuju	45	48%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.16 tentang persepsi pelaku usaha terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Sleman di nilai memadai, pada hasil tersebut responden menjawab setuju ada 47 responde (50%) itu artinya setengah dari total keseluruhan responden sependapat dengan pertanyaan. Untuk jawban sangat setuju ada 45 responden (48%) hamper setengah dari total reponden itu artinya terlihat tabel diatas ada yang kurang setuju dan tidak setuju sebesar 1% untuk masing-masing.

**TABEL 5.17.**  
Persepsi Pelaku Usaha Tentang Kredit Perbankan Di Kabupaten  
Sleman Yang Disalurkan Sudah Baik

No	Jawaban	Jumlah	Hasil
1	Sangat tidak setuju	2	2%
2	Tidak setuju	2	2%
3	Kurang setuju	19	20%
4	Setuju	49	52%
5	Sangat setuju	22	23%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari hasil tabel 5.17 diatas bahwa persepsi pelaku usaha tentang kredit perbankan di Kabupaten Sleman yang disalurkan sudah baik terlihat hasil diatas setengah dari toral keseluruhan

responden menjawab setuju 49 responden ( 52%). Ada 22 responden (23%) menjawab sangat setuju dan 19 responden kurang setuju (20%). Namun masih ada responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju atas kredit perbankan yang disalurkan sebesar 2% masing-masing 2 responden.

### 3. Faktor yang paling dominan sebagai penentu Iklim Usaha di Kabupaten Sleman

Faktor yang paling dominan sebagai penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman disajikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL 5.18.**  
Persentasi Faktor yang paling dominan sebagai penentu Iklim Usaha di Kabupaten Sleman

Faktor	Tanggapan										
	STS	TS	KS	Faktor	JML	Hasil	S	SS	Faktor	JML	Hasil
Kebijakan Pemerintah	0	3	2	5	5	1,06%	42	47	5	89	18,9%
Kestabilan Politik dan Sosial	0	1	4	5	5	1,06%	38	51	5	89	18,9%
Birokrasi	2	2	13	5	17	3,62%	51	26	5	77	16,4%
Infrastruktur	0	3	2	5	5	1,06%	40	49	5	89	18,9%
Sistem Keuangan	2	2	14	5	18	3,83%	43	33	5	76	16,2%
Total	10,6%						89,4%				
Total Keseluruhan	100,0%										

Sumber : Data Primer, 2018 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa faktor penentu iklim usaha yang paling dominan di Kabupaten Sleman berdasarkan penilaian 94 responden ada tiga yakni kebijakan pemerintah, kestabilan politik dan sosial, dan infrastruktur masing-masing dengan persentase tertinggi sebesar 18,9%. Namun apabila ditinjau dari tanggapan responden berdasarkan jawaban dari kuesioner faktor kestabilan politik dan sosial merupakan faktor

yang paling dominan penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 51 orang, sehingga menunjukkan bahwa faktor kestabilan politik dan sosial di Kabupaten Sleman dinilai dalam kategori baik oleh responden. Selanjutnya faktor infrastruktur berada di urutan kedua penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 49 orang, sehingga menunjukkan bahwa faktor infrastruktur di Kabupaten Sleman dinilai dalam kategori baik oleh responden. Faktor kebijakan pemerintah berada di urutan ketiga penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 47 orang, sehingga menunjukkan bahwa faktor kebijakan pemerintah di Kabupaten Sleman dinilai dalam kategori baik oleh responden.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kabupaten Sleman dan faktor yang dianggap paling dominan sebagai penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Pembahasan hasil penelitian berdasarkan masing-masing tujuan disajikan sebagai berikut:

## 1. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Kabupaten

### Sleman

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa iklim usaha di Kabupaten Sleman kondusif menurut persepsi pelaku usaha. Dari hasil kuisisioner persepsi pelaku usaha tentang kondisi iklim usaha di Kabupaten Sleman kondusif dari 94 responden 59% mengatakan sangat setuju dan 39 % mengatakan setuju, berarti dari hasil kuisisioner tersebut hampir seluruh responden dari total keseluruhan mengatakan bahwa iklim usaha di Kabupaten Sleman kondusif. Jawaban tersebut didukung oleh penelitian Lestari dan Hidayat, (2014) bahwa iklim usaha yang kondusif akan memperkuat pertumbuhan ekonomi atau menguntungkan dalam sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu mekanisme yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Peningkatan iklim usaha merupakan daya penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dari teori tersebut memunculkan data sebagai berikut :

**TABEL 5.19.**

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 (Persen)

No	Kategori PDRB Non Migas	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1.80	1.12
2	Pertambangan Dan Penggalian	0.17	0.43
3	Industri Pengolahan	1.96	4.42
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	3.02	2.40

Tabel Lanjutan 5.19.

5	Pengadaan Listrik Dan Gas	1.46	15.27
6	Konstruksi	4.44	4.77
7	Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6.43	6.26
8	Transportasi Dan Pergudangan	3.91	7.39
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	6.07	5.98
10	Informasi Dan Komunikasi	5.48	8.19
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	8.65	5.27
12	Real Estate	6.62	5.52
13	Jasa Perusahaan	7.13	3.55
14	Adminitrasi Pemerintah	5.20	5.89
15	Jasa Pendidikan	7.88	3.98
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	7.65	4.47
17	Jasa Lainnya	8.19	5.24
	<b>PDRB</b>	<b>5.18</b>	<b>5.25</b>

Sumber : BPS, 2018 (Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan 7 persen dari 5.18 persen menjadi 5.25 persen. Pada kategori tersebut tidak semua kategori PDRB non migas mengalami peningkatan dari ke 17 kategori diatas hanya 7 kategori saja yang mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016. Pada kategori pengadaan listrik dan gas mengalami peningkatan yang tinggi dari 1.46 persen menjadi 15.27 persen. Dilihat pada Industri pengolahan juga mengalami peningkatan dari 1.96 persen menjadi 4.42 persen. Pada peningkatan industri pengolahan tersebut juga di ikuti dengan meningkatnya jumlah industri kecil menengah Kabupaten Sleman tahun 2015-2016 dari 16,230 menjadi 16,488. Adanya peningkatan jumlah industri tersebut berarti Kabupaten Sleman dinilai aman

untuk membuka usaha. Pernyataan tersebut didukung pada hasil kuesioner persepsi pelaku usaha tentang Kabupaten Sleman dinilai aman dalam membuka usaha dari jawaban responden menyatakan sangat setuju ada 57% dari keseluruhan total responden. Maka dari itu hampir semua pelaku usaha menilai Kabupaten Sleman sangat kondusif dan aman untuk dunia usaha.

Secara umum pelaku usaha mempunyai pengetahuan yang baik tentang iklim usaha, baik dari segi manfaat maupun kegunaannya. Banyak pelaku usaha yang menganggap iklim usaha yang kondusif apabila dalam menjalankan usaha mereka tidak terdapat gangguan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah agar usahanya dapat berkembang dan maju. Iklim usaha yang kondusif menurut mereka dimana mereka mengembangkan usahanya tanpa gangguan dari siapapun dan tidak terjadi kerusuhan dalam industri usaha sehingga dapat dikatakan iklim usaha yang kondusif memberikan keuntungan bagi para pengusaha yang mengembangkan usahanya agar dapat berkembang dan maju dalam dunia usaha.

Kondisi iklim usaha yang ideal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan dari usaha mikro ke multinasional untuk berkembang dan melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan berkembang. Maka dari itu iklim usaha yang baik dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan

pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung teori tersebut peneliti sajikan data tentang garis kemiskinan sebagai berikut :

**TABEL 5.20.**  
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut  
Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta, 2016

No	Kabupaten/Kota	Garis kemiskinan (Rp/Kp/Bulan)	Penduduk miskin	
			Jumlah	Persen
1	Kulon Progo	297.353	84,34	20,30
2	Bantul	332.057	142,76	14,55
3	Gunung Kidul	264.637	139,15	19,34
4	Sleman	334.406	96,63	8,21
5	Yogyakarta	401.193	32,06	7,70

Sumber : BPS, 2018 (Diolah)

Berdasarkan tabel 5.20 diatas menunjukkan bahwa iklim usaha yang kondusif juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Pada tabel jumlah penduduk miskin menurut Kabupaetn/Kota ternyata dibanding ke empat Kabupaten di wilayah Yogyakarta Kabupaten Sleman yang menunjukkan persenan penduduk miskin yang lebih kecil. Pada tabel Kabupaten Sleman tersebut penduduk miskin 8,21 persen di bawah nilai penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta 13,34 persen.

Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Iklim usaha merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Suatu

kondisi iklim usaha yang ideal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan dari usaha-usaha mikro ke multinasional atau perusahaan swasta untuk berkembang dan melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan berkembang. Oleh karenanya, iklim usaha yang baik memainkan suatu peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan ekonomi daerah diperlukan iklim usaha yang kondusif maka dari itu perlu didorong oleh investasi dan ekspor. Pada iklim usaha yang kondusif mendorong seseorang untuk melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Faktor yang berpengaruh dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif yaitu stabilitas sosial dan politik, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi dan kepastian kebijakan (Haryotejo,B., 2012). Pada persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kabupaten Sleman ini kondusif tentunya para investor sudah mempertimbangkan segala sesuatunya untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman ini terbukti data sebagai berikut :

**TABEL 5.21.**  
Kumulatif Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Sleman tahun 2015-2016

<b>Urairan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Unit Usaha</b>		
PMA	57	66
PMDN	51	60
Non PMA/PMDN	34.842	35.628
<b>Nilai Investasi</b>		
PMA	233.545.997	233.587.773
PMDN	3.159.444	3.370.880
Non PMA/PMDN	4.756.617	5.353.299
<b>Tenaga Kerja</b>		
PMA	8.479	8.951
PMDN	11.913	12.986
Non PMA/PMDN	282.872	292.585

Sumber: BPS, 2018 (Diolah)

Berdasarkan tabel 5.21 diatas yang memuat tentang unit usaha, nilai investasi dan tenaga kerja dalam PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Sleman semua nilai diatas mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016 ini menunjukkan Kabupaten Sleman memiliki iklim usaha yang kondusif sehingga terlihat dari sektor tenaga kerja dapat mengalami peningkatan. Maka dari itu sesuai dengan teori diatas iklim usaha yang kondusif dapat mendorong investor untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari dan Hidayat, (2014) tentang “Analisis Persepsi Pengusaha terhadap Iklim Usaha di Kota Medan”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa iklim usaha di Kota Medan kondusif menurut perspektif pengusaha. Secara umum pengusaha mempunyai pengetahuan yang baik tentang iklim usaha, baik dari segi manfaat maupun kegunaannya.

## **2. Faktor Paling Dominan Sebagai Penentu Iklim Usaha di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui faktor penentu iklim usaha yang paling dominan di Kabupaten Sleman berdasarkan penilaian 94 responden ada tiga yakni kebijakan pemerintah, kestabilan politik dan sosial, dan infrastruktur masing-masing dengan persentase tertinggi sebesar 18,9%. Faktor kestabilan politik dan social merupakan faktor yang paling dominan penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 51 orang, sehingga menunjukkan bahwa faktor kestabilan politik dan sosial di Kabupaten Sleman dinilai dalam kategori baik oleh responden. Selanjutnya faktor infrastruktur berada di urutan kedua penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 49 orang, sehingga menunjukkan bahwa faktor infrastruktur di Kabupaten Sleman dinilai dalam kategori baik oleh responden. Faktor kebijakan pemerintah berada di urutan ketiga penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dari

jawaban responden yang mengatakan sangat setuju sebanyak 47 orang, sehingga menunjukkan bahwa faktor kebijakan pemerintah di Kabupaten Sleman dinilai dalam kategori baik oleh responden.

*World Economics Forum* mengemukakan bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi iklim usaha disuatu daerah adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi dan kepastian kebijakan ekonomi. Dalam penelitian Lestari dan Hidayat, (2014) faktor yang paling dominan sebagai penentu iklim usaha yaitu kestabilan politik dan sosial, diikuti faktor birokrasi, infrastruktur dan terakhir kebijakan pemerintah. Pada penelitian persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kabupaten Sleman faktor yang paling dominan sebagai penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman dari yang pertama sebagai berikut :

a. Faktor Kestabilan Politik dan Sosial

Kestabilan politik dan sosial di pilih responden sebagai faktor penentu paling dominan, dari 94 responden yang diajukan pertanyaan maka di didapatkan kestabilan politik dan sosial menjadi faktor penentu yang paling dominan dengan 18,9% dari total responden dan hanya 1,06% yang tidak sependapat dengan hal itu. Faktor yang paling dominan penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman yaitu kestabilan politik dan sosial. Kondisi politik membuat pengusaha bisa memprediksi iklim usaha. Dari segi politik biasanya gangguan yang paling meresahkan pengusaha

yaitu tekanan dari pelaku politik atau pembuat kebijakan di tingkat legislatif. Bahkan sebagian responden beranggapan harus memanfaatkan kedekatan dengan pemimpin daerah yang berkuasa karena praktik kolusi masih dipercaya para pengusaha sebagai bagian dari mempermudah untuk menjalankan bisnis, karena masih adanya sistem jatah proyek pemerintah yang dipegang oleh oknum pimpinan tertentu. Keberadaan kelompok pemuda yang kerap melakukan aksi premanisme dianggap merupakan bagian dari ancaman bagi pengusaha. Di samping itu, isu perburuhan, isu kenaikan upah yang berujung pada demonstrasi yang anarkis mengganggu jalannya sistem produksi. Tak hanya itu, bencana alam yang tak bisa diprediksi juga menjadikan kestabilan politik dan sosial menjadi sangat penting bagi pengusaha. Selain itu, apabila kondisi politik yang kurang stabil dan tidak menentu dapat berpengaruh pada menurunnya kegairahan investasi. Untuk mendukung pernyataan diatas gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh pelanggaran perda dan unjuk rasa. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban tersebut diatasi sehingga permasalahan dapat dialokasir dan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga (ILPPD, 2016).

Dari aspek politik, masyarakat di Kabupaten Sleman memiliki kedewasaan demokrasi yang baik, artinya masyarakat memiliki kesadaran sendiri menggunakan hak pilihnya sesuai dengan

aspirasi dan menghormati hak pilih orang lain. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2015 telah terselenggara dengan lancar, situasi dan kondisi Sleman tetap kondusif. Permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan koordinasi Tim Dukungan Kelancaran Pilkada yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, KPU, Panwaslu, Polres, Kodim dan Kejaksaan negeri. Demikian juga dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada 35 desa secara serentak berjalan baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 sebesar 70,00 % dan untuk pemilihan kepala desa sebesar 80.51 % (ILPPD, 2016). Dari hal tersebut di Kabupaten Sleman aman untuk membuka usaha dari hasil jawaban responden 57% sangat setuju pada pernyataan tersebut. Dilihat dari perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman yang naik pada setiap tahunnya.

**TABEL 5.22.**

Perkembangan Jumlah Perusahaan di Kabupaten Sleman

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
PMA	57	66	68
PMDN	51	60	63
Non PMA/PMDN	34.845	35.628	35.628

Sumber : BKPM DIY, 2017 (Diolah)

Ketidakstabilan merupakan unsur penting lain dalam iklim usaha. Ketidakstabilan politik di satu sisi mengakibatkan arah kebijakan pemerintah tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum (misalnya karena seringnya pergantian menteri) termasuk di bidang

investasi. Di sisi lain hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro seperti tingkat inflasi dan ketidakstabilan rupiah. Faktor sosial dibutuhkan untuk melihat dan menjaga keamanan investasi, karena Kabupaten Sleman merupakan daerah yang didomisili oleh macam-macam suku bangsa dan ras maka berpotensi terjadi kerusuhan yang bersifat etnis, agama, separatisme, kecemburuan sosial.

Menurut KPPOD (2017) ada beberapa faktor-faktor penentu daya tarik investasi disuatu daerah yaitu :

- 1) Faktor kelembagaan meliputi kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, wewenang dan pelayanan
- 2) Faktor sosial dan politik meliputi stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, keamanan dan budaya
- 3) Faktor ekonomi daerah meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi.

Keputusan pelaku usaha dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini terbentuk oleh lembaga, pemerintah, dan kelompok yang membatasi gerak-gerik kegiatan pelaku usaha. Hal seperti siapa yang berkuasa di suatu wilayah, bagaimana menjalan pemerintahannya, peran apa yang dimiliki dalam percaturan politik suatu wilayah dan bagaimana dampaknya terhadap pemilik usaha dan penciptaan profit oleh

pengusaha, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam wilayah tersebut, serta bagaimana distribusi pendapatan yang ada merupakan faktor-faktor penentu peluang dan ancaman bisnis di dalam suatu daerah.

Lingkungan sosial budaya berkaitan dengan perkembangan nilai-nilai, kaidah dan persepsi masyarakat. Masyarakat desa dan kota memiliki lingkungan yang berbeda. Masyarakat desa biasa membentuk sistem kekerabatan, sedangkan masyarakat kota memiliki sistem kekerabatan keluarga inti (Haryotejo, B., 2012).

b. Infrastruktur

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi, korupsi dan konsistensi dalam kebijakan pemerintah. Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitas yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja (Haryotejo, B., 2012).

Dalam makro ekonomi transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional dan lokal baik dipertanian maupun pedesaan. Transportasi juga banyak disebut sebagai sarana vital dalam infrastruktur. Transportasi termasuk ke

dalam salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi yang tergolong kedalam infrastruktur dasar sehingga menjadi permasalahan yang berrati untuk terbentuknya iklim usaha suatu daerah (Lestari dan Hidayat, 2014).

Infratraktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sara dan prasaran fisik merupakan bagian yang snagta penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung kegiatan peemrintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Ketersediaan Prasarana dan sarana publik Kabupaten Sleman yang semakin baik dan memadai ini juga di dukung oleh jawaban responden yang menilai kondisi Infrastruktur di Kabupaten Sleman dengan jawaban yang sepakat 18,9% dan tidak sepakat 1,06% .

**TABEL 5.23.**

Panjang Jalan Menurut Keadaan Jalan di Kabupaten Sleman Tahun 2016

No	Keadaan jalan	Status Jalan Raya (km)
1	Diaspal	689,62
2	Kerikil	8,33
3	Tanah	1,5
	<b>Total</b>	<b>699,50</b>
1	Baik	379,58
2	Sedang	215,51
3	Rusak	32,38
4	Rusak berat	32,38
	<b>Total</b>	<b>699,50</b>

Sumber : BPS, 2017 (Diolah)

Pemerintah Kabupaten Sleman guna menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan jalan, memberikan bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya 1.106 drum. Dari berbagai upaya yang dilaksanakan pada tahun 2016 jalan Kabupaten dalam kondisis baik sepanjang 379,58 km atau sebesar 54,26% dari panjang keseluruhan 699,50 km. kondisi ini lebih baik dari 2015 yang sebesar 51,60%. Sedangkan pembangunan dan rehabilitas jembatan dapat meningkatkan jumlah saluran air dengan gorong-gorong.

Dalam rangka upaya mengurangi kerusakan prasarana jalan dan lingkungan, dilakukan pemeriksaan rutin bagi kendaraan bermotor. Tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan 3.000 lebih kendaraan umum dan 17.000 kendaraan bukan umum. Disamping itu dilakukan pembinaan kepada juru parker tepi jalan umum dan pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan perhubungan darat mendapat apresiasi dari Kementerian Perhubungan berupa Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2015. Sedangkan pada penyediaan sarana dan prasarana pengairan berupa bendung dan irigasi, setiap tahun dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga meningkat kualitasnya (BPS, 2017).

c. Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif, kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi iklim investasi. Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendukung investasi pengembangan usaha. Berbagai program kebijakan yang dikembangkan untuk menciptakan iklim usaha yang terbuka, kondusif dan aman. Berbagai regulasi telah disiapkan untuk mendukung upaya ini seperti pengaturan pajak dan retribusi yang berimbang yang mendukung dunia usaha.

Pada tahun 2015 pemerintah membentuk BPMPT (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu) dengan pelayanan 24 jenis izin. Pada tahun 2017 ini DPMPPT diberi kewenangan penuh melayani semua jenis perijinan, proses perizinan dilaksanakan secara utuh dalam satu pintu mulai dari penerimaan berkas, pemrosesan izin, dan penribitan izin. Proses perizinan menjadi lebih cepat selesai missal SIUP yang semula 10 menjadi 3. Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada Kecamatan selain mempercepat proses juga mengurangi beban transportasi bagi masyarakat. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan Forum Komunikasi Pelaku Usaha yang rutin dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha dan instansi di luar Pemda agar dapat terjalin komunikasi antara Kebijakan Pemda dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebijakan pemberian Insentif kepada pengusaha diatur dalam

Perbub yang memberikan tenggang waktu selama 3 bulan untuk pembayaran pajak daerah di awal usaha. Pemerintah daerah juga melakukan pengurangan pajak dan retribusi untuk usaha baru yang mengalami kesulitan ekonomi seperti yang ada dalam perbub tentang tata cara pemberian pengurangan, keringan, pembebasan pajak dan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan intensif dalam kawasan seiring dengan rencana pengembangan iklim investasi. Penataan dalam kawasan bertujuan membangun sistem koordinasi antar sektor industri yang lebih efisien, meningkatkan daya saing industri dan investasi (Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, 2012)

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan keamanan dalam berusaha dengan memberikan kepastian hukum terutama dalam mekanisme perizinan. Pemerintah daerah juga mendorong perkembangan usaha kecil menengah dalam bentuk kemudahan perizinan dan bantuan modal berupa fasilitas untuk sertifikasi halal, HAKI, PIRT, Penetapan Perbub Tata Kelola Batik Sleman, Kemudahan memperoleh tanah untuk 5 tahun kedepan.

Dari berbagai kebijakan daerah yang sudah ditetapkan persepsi pelaku usaha tentang kebijakan pemerintah dalam dunia usaha dinilai baik. Pernyataan tersebut didukung oleh jawaban responden yang sependapat dengan hal itu sebesar 18,9% dan tidak

sepakat sebesar 1,06%. Maka dari itu para pelaku usaha menilai kebijakan pemerintah dalam dunia usaha dinilai baik. Kebijakan pemerintah dianggap pro terhadap pengusaha karena kebijakan pemerintahan mempermudah para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

d. Birokrasi

Birokrasi merupakan instrument pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Berbagai permasalahan yang ada dalam birokrasi merupakan serangkaian permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi baik pusat maupun daerah. Namun kadang birokrasi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Sehingga jika masyarakat membicarakan birokrasi yang ada berpikiran negatif tentang birokrasi. Bahkan birokrasi diidentik dengan korupsi, inefisiensi, pelayanan yang berbelit-belit, rendahnya tingkat akuntabilitas, responsifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Lestari dan Hidayat, 2014). Menurut KPPOD (2017), kemudahan berusaha di Indonesia belum mampu dicapai daerah dari segi prosedur, waktu dan biaya. Meskipun pemerintah daerah sudah menentukan pengurusan izin usaha bisa cepat dan mudah tapi dalam praktek lapangan sungguh berbeda.

Pada faktor penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman birokrasi kurang memberikan pengaruh dilihat dari hasil responden yang setuju sebesar 16,4% dan tidak setuju 3,62% menjadikan birokrasi diurutan ke empat pada faktor penentu iklim usaha. Pemerintah daerah menentukan cara untuk memberantas pungli di luar tarif yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah daerah membentuk satuan berantas (Saber) pungli, memasang pengumuman bebas pungli di ruang pelayanan publik, pembayaran pajak/retribusi perizinan langsung ke Bank BPD DIY, serta akan menerapkan pembayaran retribusi pasar secara *autodebet* yang akan di ujicobakan di pedagang kios pasar godean.

e. Sistem Keuangan

Suatu sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Adapun fungsi pokok dalam sistem keuangan memiliki fungsi sebagai fungsi tabungan, kekayaan, likuiditas, kredit, pembayaran, seriko, serta fungsi kebijakan. Sehingga ciri utama dari sistem keuangan diantaranya kepercayaan, memiliki kemampuan intermediasi, dan efisiensi. Dengan demikian produk keuangan dalam sistem keuangan harus mampu memberikan rasa

aman, efisiensi dan menguntungkan termasuk kondisi industri keuangan stabil.

Sistem keuangan diurutkan terakhir dengan persentase 16,2% dan tidak sepakat 3,83% atau tidak setuju. Para pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa sistem keuangan kurang memberikan pengaruh terhadap iklim usaha. Karena sistem keuangan Kabupaten Sleman dirasakan cukup baik bagi para pelaku usaha. Kredit perbankan di Kabupaten Sleman yang disalurkan sudah baik serta tersedianya lembaga keuangan di Kabupaten Sleman cukup memadai. Adapun lembaga keuangan perbankan yang terdiri dari 1 buah kantor cabang PT.BNI dengan 8 kantor cabang pembantu dan 4 kantor kas unit, 1 buah kantor cabang Bank Pembangunan Daerah dengan 5 kantor cabang pembantu dan 10 kantor kas unit, 1 buah kantor cabang BRI dengan 27 kantor kas unit, 1 buah kantor cabang Danamon, 1 buah Bank Mandiri, 1 buah Bank Panin Tbk, 22 buah Badan Kredit Desa, 17 buah Badan Usaha Kredit Pedesaan, 36 buah BPR, dan 40 buah BMT (BPS, 2017).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari dan Hidayat, (2014) tentang “Analisis Persepsi Pengusaha terhadap Iklim Usaha di Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu terciptanya iklim

usaha di Kota Medan yang kondusif menurut pengusaha adalah kestabilan politik dan sosial.